

# ADALISIS



## JURNAL PENDIDIKAN

PRINSIP PEMIKIRAN PENDIDIKAN DALAM ALIRAN  
FILSAFAT HUMANISME MODERN DALAM PANDANGAN ISLAM  
Arman Husni

MENGEMBANGKAN KARAKTER PESERTA DIDIK  
MELALUI KECERDASAN SPRITUAL  
Darul Ilmi

KEUTAMAAN MERINGKAS DENGAN *MIND MAP* (MM)  
Deswalantri

PENGEMBANGAN DIRI MELALUI PENDEKATAN  
*SPRITUAL EMOTIONAL FREEDOM THERAPY* (SEFT)  
Dodi Pasilaputra

HIDDEN CURRICULUM IN ENGLISH FOREIGN LANGUAGE TEACHING  
Febria Sri Artika

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA MENGHADAPI  
TANTANGAN GLOBAL (Kasus IAIN dan Perguruan Tinggi Islam)  
Iswantir M

CAMPUR KODE BAHASA LISAN MAHASISWA IAIN BUKITTINGGI  
Jasmienti

ANALISIS FILOSOFIS DAN TEORITIS TENTANG EVALUASI  
PROGRAM PEMBELAJARAN  
Yanti Elvita

**PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA  
MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL  
( Kasus IAIN dan Perguruan Tinggi Islam )  
Iswantir M**

**Abstrak:** *PTAIN didirikan di Yogyakarta pada bulan September 1951 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950, yang ditanda tangani oleh Presiden RI. Pada bulan Juni 1957 di Jakarta dibuka Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) oleh Departemen Agama berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957. Pembentukan IAIN ini mulai berlaku resmi pada tanggal 9 Mei 1960 berdasarkan Lembaran Negara No. 61 Tahun 196, sedangkan IAIN Jakarta resmi ditetapkan pada tanggal 5 Desember 1963 merupakan IAIN kedua setelah IAIN Yogyakarta. Kedua IAIN inilah yang pada akhirnya menjadi koordinator fakultas-fakultas yang berdiri di daerah-daerah yang dekat keberadaannya. Saat ini Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dalam menghadapi tantang global, terutama IAIN dan STAIN sudah mengalami transformasi kelembagaan, baik dari IAIN/STAIN menjadi UIN maupun dari STAIN menjadi IAIN.*

**Key Word:** *Pendidikan Islam, Perguruan Tinggi Islam, Tantangan Global*

## **A. Pendahuluan**

Di antara faktor terpenting penyebab pertumbuhan kelembagaan Islam adalah ekspansi kaum santri melalui pendidikan. Harus diakui, bahwa kaum Muslimin Indonesia umumnya hanya memiliki akses yang sangat terbatas ke dalam sistem pendidikan kolonial Belanda. Tetapi dengan tercapainya kemerdekaan, kaum Muslimin memperoleh kesempatan lebih luas untuk mendapatkan pendidikan. Kesempatan lebih luas itu mulai secara actual terwujud khususnya sejak akhir 1950-an dengan pembentukan universitas-universitas negeri, dan lebih khusus lagi perguruan tinggi agama Islam.<sup>1</sup>

Perguruan Tinggi Kagamaan Islam Negeri (PTKIN di Indonesia berjumlah 55 yang terdiri dari 11 UIN, 25 IAIN dan 19 STAIN, sedangkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) berjumlah lebih kurang 641 buah. Dalam perjalanannya tidaklah mudah menempatkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ke dalam jajaran perguruan tinggi umum (PTU) Indonesia. Lembaga ini memiliki riwayat tersendiri yang berbeda dari lembaga pendidikan tinggi lain. Awalnya, ia tidak didirikan untuk memenuhi kebutuhan akademik saja, melainkan juga agama, ideologi dan bahkan politik.

Untuk merespon tuntutan masyarakat dan kemajuan sains dan teknologi, serta globalisasi, maka muncul pembaruan lembaga pendidikan Islam, termasuk terhadap lembaga pendidikan tinggi Islam. Pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran IAIN dan PTI yang merupakan kelanjutan pembaruan sistem pendidikan sebelumnya. Hal ini menarik dikaji tentang kaitan pembaruan sistem pendidikan di Indonesia dengan perkembangan pendidikan tinggi Islam.

Dalam makalah ini akan digambarkan bagaimana perkembangan IAIN dan Perguruan Tinggi Islam (PTAI) di Indonesia, mulai dari berdirinya sampai saat ini. Kajian dalam tulisan ini juga menggambarkan peran IAIN dan PTAI dalam pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sejarah Pertumbuhan IAIN dan Perguruan Tinggi Islam**

Upaya tokoh-tokoh Islam untuk memberdayakan umat Islam di Indonesia dalam jalur pendidikan juga diwujudkan dengan mendirikan perguruan tinggi Islam sebagai sebuah lembaga lanjutan. Upaya ini disempurnakan secara berkesinambungan mulai dari awal hingga sekarang dengan berbagai terobosan yang bersifat politis, kultural, sosial, maupun birokratik. Secara kualitatif, upaya tersebut dapat dinilai berhasil karena belakangan ini telah bermunculan berbagai perguruan tinggi yang berlabel Islam. Perguruan tersebut mulai dari yang berlokasi di ibu kota (Jakarta) hingga di wilayah kecamatan yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.<sup>2</sup>

Kelahiran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) tidak lain karena usaha gigih umat Islam, yang mayoritas di Indonesia ini, dalam usaha mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lengkap, yang dimulai dari sistem pendidikan pesantren yang sederhana sampai ke tingkat perguruan tinggi. Keberadaan IAIN tersebut erat kaitannya dengan cita-cita umat Islam yang ingin memajukan ajaran-ajaran Islam di Indonesia. Setelah mengalami proses perjuangan melawan imperialis yang panjang, umat Islam mengalami keterbelakangan dan keterpecahan disemua aspek kehidupan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah terisolasi dari perubahan dan perkembangan zaman.<sup>3</sup>

Hasrat untuk mendirikan semacam lembaga pendidikan tinggi Islam sudah juga dirintis sejak zaman penjajahan. Dr. Satiman Wirjosandjoyo dalam Pedoman Masyarakat No. 15 Tahun IV (1938) pernah melontarkan gagasan pentingnya sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum muslim di tanah Hindia Belanda yang terjajah itu. Dikatakan oleh Satiman antara lain bahwa sewaktu Indonesia masih tidur, *onderwijs* (pengajaran) agama di pesantren mencukupi keperluan umum. Akan tetapi setelah Indonesia bangun, maka diperlukan adanya sekolah tinggi agama. Apalagi dengan kedatangan kaum Kristen yang banyak mendirikan sekolah dengan biaya rendah dan dikelola oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, maka keperluan akan adanya sekolah

tinggi agama Islam itu semakin terasa lagi dan kalau tidak, pengaruh Islam akan semakin kecil.<sup>4</sup>

Perguruan Tinggi Islam pada awalnya sudah didirikan oleh Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI) di Padang yang dipimpin oleh Mahmud Yunus dengan nama Sekolah Islam Tinggi. Perguruan Tinggi Islam itu dibuka pada tanggal 9 Desember 1940, yang memiliki dua fakultas, yakni fakultas syari'ah (agama) dan fakultas pendidikan dan bahasa Arab. Perguruan Tinggi Islam ini menjadi perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia. Perguruan Tinggi Islam ini bertahan sampai tahun 1942, karena bulan Maret 1942 Jepang memasuki Kota Padang. Pemerintah Jepang menutup Sekolah Islam Tinggi tersebut, karena Jepang hanya mengizinkan membuka sekolah/madrasah dari tingkat rendah sampai menengah saja.<sup>5</sup> Tujuan yang diinginkan pada waktu itu adalah untuk mendidik dan mencetak ulama-ulama yang handal dan berwawasan luas.<sup>6</sup> Dalam Kongres ke II Majelis Islam 'Ala Indonesia (MIAI) yang berlangsung tanggal 2-7 Mei 1939 juga salah satu agenda pembahasannya adalah tentang perguruan tinggi Islam. Realisasi hasil kongres tersebut didirikanlah di Solo Perguruan Tinggi Islam yang dimulai dari tingkat menengah dengan nama *Islamiche Middelbare School (IMS)*.<sup>7</sup>

Menjelang Indonesia merdeka pada bulan April 1945 Majelis Syurah Muslimin Indonesia (Masyumi) membentuk panitia rencana Sekolah Tinggi Islam yang diketuai oleh Muh. Hatta dan sekretarisnya M. Natsir. Sekolah tinggi ini dibuka secara resmi pada tanggal 8 Juli 1945 bertepatan dengan 27 Rajab 1364 H. Disebabkan karena situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia pada waktu itu, maka STI tersebut dipindahkan ke Yogyakarta, maka pada tanggal 10 April 1946 perkuliahan STI kembali dibuka di Yogyakarta. Pada bulan November 1947 STI dikembangkan menjadi universitas dengan nama Universitas Islam Indonesia mengasuh empat fakultas yaitu agama, hukum, pendidikan, dan ekonomi. Yang dibuka secara resmi pada tanggal 10 Maret 1948, bertepatan dengan 27 Rajab 1367 H. Perkembangan berikutnya adalah Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia dinegerikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN).<sup>8</sup> PTAIN didirikan untuk memberikan pelajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam.<sup>9</sup>

Untuk memenuhi tenaga guru di Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHA) dan tenaga dosen agama Islam di perguruan tinggi umum, maka Departemen Agama mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). PTAIN didirikan di Yogyakarta pada bulan September 1951 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950, yang ditanda tangani oleh Presiden RI. Pada bulan Juni 1957 di Jakarta dibuka



Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) oleh Departemen Agama berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957. Tujuannya untuk mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri, untuk menjadi guru agama pada sekolah lanjutan atas atau menjadi petugas di bidang pendidikan di lingkungan Departemen Agama.<sup>10</sup>

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) didirikan pada tanggal 9 Mei 1960 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1960. Pendirian IAIN adalah gabungan dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yokyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta. IAIN ketika itu memiliki empat fakultas, yakni fakultas ushuluddin, fakultas syari'ah, fakultas adab dan fakultas tarbiyah. Di Yokyakarta ada dua fakultas, yakni fakultas ushuluddin dan syari'ah, sedangkan di Jakarta dua fakultas yakni fakultas adab dan tarbiyah. Lama belajar di IAIN mempunyai tingkatan, yakni:

1. Tingkat pertama bernama *Propaedeuse* selama 1 Tahun.
2. Tingkat kedua bernama kandidat selama 1 tahun.
3. Tingkat ketiga bernama *Bakalaureat* selama 1 tahun dan akhiri dengan ujian *Bakalaureat* (Sarjana Muda).
4. Tingkat keempat bernama doktoral selama 2 tahun dan diakhiri dengan ujian Doktoral (Sarjana).<sup>11</sup>

Namun kondisi ini pun tidak berlangsung lama, karena setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1960, yang berintikan penggabungan PTAIN dan ADIA dengan nama baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berkedudukan di Yokyakarta. Pembentukan IAIN ini mulai berlaku resmi pada tanggal 9 Mei 1960 berdasarkan Lembaran Negara No. 61 Tahun 1960. Dengan kata lain, PTAIN di Indonesia saat itu hanya berada di Yokyakarta, sementara kebutuhan masyarakat –mayoritas beragama Islam- yang masih kental dengan ideology mereka masih membutuhkan Perguruan-perguruan Tinggi Agama Islam lain yang tidak hanya berada di Yokyakarta. Terbukti dengan pesatnya perkembangan IAIN yang ditandai banyaknya fakultas-fakultas cabang di daerah-daerah untuk menyerap dan menampung besarnya minat-minat dan jumlah umat Islam untuk masuk ke IAIN. Ini kemudian yang melatarbelakangi lahirnya yang terpisah dari pusat. Berdasarkan pertimbangan historis dan intelektual-akademik, maka Jakarta mendapatkan mandate dan berkesempatan untuk mendirikan IAIN. Dengan demikian, IAIN Jakarta resmi ditetapkan pada tanggal 5 Desember 1963 merupakan IAIN kedua setelah IAIN Yokyakarta. Kedua IAIN inilah yang pada akhirnya menjadi koordinator fakultas-fakultas yang berdiri di daerah-daerah yang dekat keberadaannya. Dalam hal ini pemerintah – Departemen Agama- telah memberikan aturan sebagai berikut:

1. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengoordinasikan fakultas-fakultas dalam lingkungan IAIN yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengoordinasikan fakultas-fakultas yang berada di Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera.<sup>12</sup>

Mukti Ali ketika menjadi menteri agama, mengeluarkan kebijakan tentang pembenahan IAIN. Segera setelah Departemen Agama mencanangkan perluasan pendidikan tinggibagi umat islam, sebagaimana tercantum dalam Repelita I Tahun 1969-1973, umat Islam secara beramai-ramai entah atas nama yayasan agama, organisasi, pesantren atau pribadi, mendirikan IAIN. Sementara IAIN yang berada di kota kabupaten, seperti Cirebon, Malang dan Mataram, yang dipandang memenuhi syarat dijadikan IAIN cabang yang secara administrative berada di bawah supervise IAIN yang ada di kota provinsi.<sup>13</sup>

Setelah itu, IAIN terus berkembang dan menyebar ke berbagai daerah Indonesia, sehingga IAIN sudah berjumlah 14 buah, yakni: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didirikan tahun 1960, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1963, IAIN ar Raniry Banda Aceh tahun 1964, IAIN Raden Fatah Palembang tahun 1964, IAIN Antasri Banjarmasin tahun 1964, IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1965, IAIN Alauddin Ujung Pandang tahun 1965, IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1966, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi tahun 1967, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1968, IAIN Raden Intan Lampung tahun 1968, IAIN Walisongo Semarang tahun 1970, IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru tahun 1970 dan IAIN Sumatera Utara tahun 1973, dan. Dari 14 IAIN tersebut 5 berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Kemudian muncul beberapa IAIN baru, yakni IAIN Mataram, IAIN Sultan Amal Gorontalo, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang, IAIN Ambon, IAIN Cirebon dan terakhir pada tahun 2011 IAIN Surakarta. Dengan demikian sampai saat ini di Indonesia ada 15 IAIN.

Menurut Azra, bahwa aspirasi umat Islam umumnya bagi pembentukan perguruan tinggi Islam secara umum didorong oleh setidaknya tiga tujuan; *pertama*, untuk melaksanakan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara lebih sistematis dan terarah; *kedua*, untuk melakukan pengembangan dan peningkatan dakwa Islam, sehingga Islam dipahami dan dilaksanakan secara lebih baik oleh mahasiswa dan kaum muslimin umumnya dan *ketiga*, untuk melakukan reproduksi dan kaderisasi ulama dan fungsionaris keagamaan lainnya, baik pada birokrasi Negara, seperti Departemen Agama, maupun lembaga-lembaga social, dakwah dan pendidikan Islam swasta.<sup>14</sup>

Meskipun pertumbuhan IAIN semakin pesat, perguruan tinggi swasta pun tumbuh subur di masyarakat. Pertumbuhan pesat IAIN di daerah tidak menjadi halangan pihak swasta untuk mendirikan fakultas agama, terutama di kota-kota besar. Masyarakat sangat antusias mendirikan fakultas-fakultas agama, khususnya sekitar tahun enam puluhan dengan tujuan untuk membendung komunisme, atheism, demi kepentingan syari'ah dan dakwah, serta untuk menampung mereka yang tidak diterima di IAIN. Fakultas-fakultas agama tersebut pada mulanya hanya "terdaftar" dari Direktorat Perguruan Tinggi Agama Departemen Agama, kemudian meningkat menjadi "diakui" sehingga sekitar tahun 1972 terdapat sekitar 110 fakultas agama yang berinduk pada 81 perguruan tinggi Islam negeri.<sup>15</sup>

Berdasarkan SK Mendikbud No. 0686/U/1991 pasal 13 ayat 2, bahwa perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama berbentuk akademi, sekolah tinggi dan institut. Mengingat PTAIS itu pola acuannya pada IAIN maka logikanya nama kelembagaannya perlu mengacu pada IAIN pula. Dengan demikian PTAIS yang berbentuk Akademi, menjadi Akademi Agama Islam, Sekolah Tinggi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut menjadi Institut Agama Islam dan khusus yang berbentuk Fakultas (yang selama ini ada di dalam universitas), menjadi Fakultas Agama Islam disingkat FAI, dengan membina minimal 2 jurusan.<sup>16</sup>

Sejak diberlakukan Program Sarjana (Program S1), sebagai pengganti Program Sarjana Muda dan Program Sarjana Lengkap, pada tahun 1985, dalam lingkungan IAIN telah terjadi tiga kali perubahan kurikulum. Kurikulum tahun 1988, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 122, dilaksanakan mulai tahun Akademik 1989/1990. Sampai dengan tahun 1995, pelaksanaan kurikulum ini memasuki tahun ketujuh. Pada masa berikutnya memerlukan penyesuaian berkenaan dengan diundangkan dan diberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>17</sup> Perubahan kurikulum IAIN ini menandakan bahwa IAIN harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

## **2. Berdirinya Program Pascasarjana (PPs) di IAIN dan PTAI**

Program Pascasarjana (PPs) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) telah terselenggara dalam waktu yang cukup lama. PPs pertama kali diselenggarakan di IAIN Jakarta (Sejak 1982), dan IAIN Yogyakarta (sejak 1983). Selanjutnya disusul oleh

IAIN Banda Aceh (sejak 1989), IAIN Ujungpandang (sejak 1990), IAIN Surabaya, IAIN Padang, IAIN Medan (ketiganya sejak 1994).<sup>18</sup> Sampai ini program pascasarjana didirikan diberbagai PTAIN dan PTAIS, bahkan semua UIN dan IAIN sudah memiliki program pascasarjana, serta beberapa STAIN sudah memiliki program pascasarjana. Ini menandakan bahwa sejak awal didirikan program pascasarjana pada tahun 1982 sudah diikuti oleh beberapa perguruan tinggi Islam.

Program pascasarjana IAIN memiliki tujuan umum untuk menghasilkan tenaga ahli ilmu agama Islam yang merupakan inti dari tenaga penggerak pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu.<sup>19</sup> Adapun tujuan khususnya adalah; *pertama*, mengembangkan kemampuan dan keahlian peserta untuk menguasai bidang ilmu agama Islam termasuk ilmu bantu yang diperlukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam serta mengamalkannya pada masyarakat. *Kedua*, memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidang-bidang ilmu agama Islam dan penelitian sesuai dengan bidang program yang bersangkutan. *Ketiga*, memiliki sikap ilmiah dan amal ilmiah sebagai tenaga ahli di bidang ilmu agama Islam yang bertanggungjawab.<sup>20</sup>

### **3. Perubahan Fakultas Cabang IAIN menjadi STAIN**

Malik Fadjar, ketika menjabat Dirjen Binbagais Departemen Agama, mengusulkan pembenahan dan rasionalisasi organisasi Perguruan Tinggi Agama Islam atau IAIN. Hasil dari rasionalisasi organisasi IAIN ini kemudian melahirkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997, yang fakultas cabang di lingkungan IAIN berubah menjadi STAIN. Hal yang mendasari Malik Fadjar memunculkan gagasan ini adalah karena nama fakultas cabang sebetulnya bertentangan dengan undang-undang. Struktur Perguruan Tinggi yang benar adalah Universitas, Institut, Akademi dan Diploma. Untuk mewujudkan gagasan tersebut Malik melakukan komunikasi intensif dengan berbagai kalangan; dengan Depdiknas, Departemen Anggaran, Bappenas, Menpas dan juga DPR. Usaha ini terwujud dengan lahirnya Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1997 yang menyatakan 33 fakultas cabang IAIN menjadi STAIN.<sup>21</sup>

Dari 33 STAIN tersebut, STAIN Malang kemudian berubah menjadi UIN Malang, STAIN Ambon berubah menjadi IAIN Ambon, STAIN Gorontalo berubah menjadi IAIN Amal Gorontalo, STAIN Mataram berubah menjadi IAIN Mataram, STAIN Serang berubah menjadi IAIN Maulana Hasanuddin Serang dan STAIN Cirebon berubah menjadi IAIN Cirobon. Hal ini dapat dipahami bahwa STAIN selalu berupaya mengembangkan



kelembagaannya satu berubah menjadi UIN dan lima sudah berubah status menjadi IAIN. Terakhir STAIN Surakarta berubah status menjadi IAIN Surakarta.

#### 4. Perubahan IAIN/STAIN menjadi UIN

Sejak keberadaan umat manusia di bumi secara evolusi dan gradual telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak penemuan-penemuan baru sebagai hasil dari upaya manusia mengembangkan ilmu tersebut. Di pandang dari sudut konsep keilmuan dalam Islam, ilmu itu terbagi kepada dua macam, sesuai dengan hasil konferensi pendidikan Islam sedunia, yaitu ilmu yang tergolong *perennial knowledge* dan ilmu yang tergolong *acquired knowledge*. Ilmu *perennial knowledge* adalah ilmu yang bersumber dari wahyu, sedangkan ilmu *acquired knowledge* adalah ilmu yang bersumber dari perolehan manusia. Dalam konsep Islam, kedua jenis keilmuan itu menyatu dalam satu kesatuan. Bertolak dari konsep tersebut, maka idelanya suatu lembaga pendidikan tinggi Islam adalah mengembangkan kedua ilmu secara simultan, tanpa memisahkannya, apalagi mempertentangkannya. Untuk mengembangkan kedua ilmu tersebut secara seimbang, maka perlu dirancang pengembangan kedua ilmu tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Karel Steenbrink, bahwa nama yang diberikan IAIN, salah satu lembaga pendidikan ini agak terbatas, sehingga tidak boleh memakai istilah universitas, sehingga dipilih nama institute. Tetapi IAIN yang didirikan di beberapa propinsi, memakai nama *al-jami'ah*, yang merupakan istilah untuk universitas dalam bahasa Arab. Walaupun istilah ini tidak begitu mempunyai arti untuk kebanyakan orang Indonesia dan hanya menunjuk kepada dunia Arab (seperti semua perkara Islam selalu berhubungan dengan Arab) namun hal itu menunjukkan bahwa para pemimpin Islam masih menganggap bahwa nama tersebut mempunyai nilai-nilai universal sesuai dengan ide universitas. Begitu juga meskipun IAIN mempunyai orientasi yang agak terbatas, namun masih ada harapan agar IAIN sanggup menghasilkan sarjana ilmu pengetahuan yang sejajar dengan universitas lain, serta secara kualitatif relevan dengan semua aspek peradaban yang komplit.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan pengembangan IAIN, Azyumardi Azra, mengajukan beberapa rekomendasi, yakni: (1) reformulasi tujuan IAIN, (2) rekonstruisasi kurikulum, (3) simplikasi beban perkuliahan, (4) dekompartementalisasi, (5) liberalisasi sistem SKS.<sup>24</sup> Dalam merespon perkembangan zaman yang semakin sarat dengan kecanggihan teknologi, sekarang ini banyak pengelola IAIN/STAIN yang telah merubah lembaga tersebut menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Perubahan tersebut dilakukan karena beberapa hal, yaitu *pertama*; keberadaan PTAIN sekarang ini tidak lagi hanya bertujuan untuk melahirkan para

ulama yang dapat membaca kitab kuning, memimpin tahlil atau menjadi imam masjid, tetapi juga keberadaannya harus mampu merespon permasalahan zaman yang semakin kompleks. *Kedua*, keberadaan PTAIN menjadi alternative tumpuan masyarakat dunia dalam menggali berbagai keterampilan yang dapat digunakan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, keberadaan sebuah perguruan tinggi sekarang ini harus tampil lebih inovatif, progresif seiring dengan kemajuan zaman. Lulusannya harus ditunjang oleh ilmu pengetahuan yang mumpuni, keterampilan yang handal, serta memiliki komitmen moral yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup>

*Issue* pengembangan IAIN menjadi UIN sebenarnya sudah mulai digulirkan sejak Departemen Agama dipimpin oleh H. Tarmizi Taher. *Issue* tersebut saat ini agaknya mulai ada titik terang, dengan diadakannya 5 IAIN (Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Pekanbaru, Ujung Pandang) dan satu STAIN (Malang) sebagai *pilot project* pengembangan menuju UIN.

UIN merupakan wujud perkembangan paling signifikan dari serangkaian perjuangan kelembagaan PTAIN, setidaknya sampai sekarang ini. Sebab, perubahan dari IAIN, atau apalagi STAIN, menjadi UIN memiliki implikasi yang luas, baik menyangkut posisi kelembagaan, peluang pembukaan program studi, persaingan akademik, maupun penghapusan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Menurut Azyumardi Azra, seperti yang dikutip oleh Mujamil Qomar, bahwa perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Jakarta pada dasarnya bertujuan untuk mendorong usaha reintegrasi epistemology keilmuan yang pada gilirannya menghilangkan dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Hal ini penting dalam rangka memberikan landasan moral Islam terhadap perkembangan iptek dan sekaligus mengartikulasikan ajaran Islam secara proporsional di dalam kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Transformasi IAIN/STAIN menjadi UIN tentunya akan menuntut perubahan-perubahan cara pandang, sikap, dan kiat para civitas akademika dalam mengembangkan kultur dan tradisi akademik serta *manage* berbagai jurusan/program studi yang dikembangkannya dalam konteks masa transisi menuju UIN. Perubahan secara *coercive* ini perlu dilakukan untuk menghindari kekecewaan public dan komunitas masyarakat yang menjadi *customers*, serta berbaliknya persepsi dan *image* mereka terhadap eksistensi kita. Persoalannya adalah dari mana dan bagaimana cara memulainya ? Ini merupakan persoalan krusial yang patut dipahami oleh masing-masing warga civitas akademika.<sup>27</sup>

Abudin Nata mengatakan bahwa ada lima alasan yang melatarbelakangi perlunya konservasi IAIN menjadi UIN, yakni (1) ada perubahan jenis pendidikan pada madrasah

alayah, (2) ada dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, (3) perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang yang lebih luas bagi para lulusannya untuk dapat memasuki lapangan kerja yang lebih luas, (4) perubahan IAIN menjadi UIN diperlukan dalam rangka memberikan peluang kepada lulusan IAIN untuk melakukan mobilitas vertical, yakni kesempatan dan peran untuk memasuki medan gerak yang lebih luas dan (5) perubahan IAIN menjadi UIN sejalan dengan tuntutan umat Islam, yang selain menghendaki adanya pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang professional dan berkualitas tinggi juga dapat menawarkan banyak pilihan.<sup>28</sup>

Alasan lain perubahan IAIN menjadi UIN adalah (1) untuk memberikan peluang mendapatkan pendidikan tinggi yang lebih luas kepada para tamatan madrasah, (2) agar tamatan UIN dapat memasuki dunia lapangan kerja yang lebih luas, (3) agar UIN dapat menampung tamatan madrasah yang keadaannya sudah berubah menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) yang bercorak keagamaan, (4) untuk meningkatkan martabat PTI (Perguruan Tinggi Islam) yang berada di bawah Departemen Agama sehingga sejajar dengan martabat perguruan umum yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional, dan jika dimungkinkan lebih tinggi lagi martabatnya.<sup>29</sup>

Gagasan dan konsep tentang pengembangan IAIN menjadi UIN bertitiktolak dari beberapa masalah yang dihadapi IAIN dalam perkembangannya selama ini. Beberapa masalah pokok itu adalah sebagai berikut. *Pertama*, IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Di antara ketiga lingkungan ini, kelihatannya peran IAIN lebih besar pada masyarakat, karena kuatnya orientasi kepada dakwah daripada pengembangan ilmu pengetahuan. *Kedua*, kurikulum IAIN belum mampu meresponi perkembangan iptek dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan terutama karena bidang kajian agama yang merupakan spesialisasi IAIN kurang mengalami interaksi dan *reapproachment* dengan ilmu-ilmu umum, bahkan masih cenderung dikotomis..<sup>30</sup>

Untuk menangkap dan memahami visi dan misi pengembangan IAIN/STAIN ke UIN setidaknya-tidaknya dapat dibidik dari tiga dimensi, yaitu (1) dimensi normatife-teologis, (2) dimensi filosofis dan (3) dimensi historic-empiris. Di lihat dari dimensi normative-telogis, doktrin Islam pada dasarnya mengajarkan kepada umatnya untuk memasuki Islam secara kaffah/menyeluruh sebagai lawan dari ber-Islam yang parsial. Dari segi dimensi filosofis jika paradigm pendidikan Islam adalah sebagai upaya pengembangan pandangan hidup Islami, yang diwujudkan dalam sikap hidup dan manifestasikan dalam keterampilan hidup sehari-hari, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan bertolak dari suatu

pandangan yang *theosentris*, di mana proses dan produk pencarian, penemuan iptek lewat studi, penelitian dan eksperimen, serta pemanfaatannya dalam kehidupan, merupakan realisasi dari misi kekhalifahan dan pengabdian kepada Allah di dunia dalam rangka mencari rida-Nya dalam kehidupan ukhrawi. Kehidupan yang Islami menggarisbawahi perlunya bangunan *ontology*, *epistimologi* dan *aksiologi* ilmu pengetahuan yang tidak hanya meyakini kebenaran *sensual-indrawi*, logic dan etik insane, tetapi juga mengakui dan meyakini kebenaran *transcendental (Ilahi)*.<sup>31</sup>

Di lihat dari *dimensi historic*, secara garis besar Sejarah (kebudayaan) Islam – menurut Nasution (1995)- dapat dibagi ke dalam tiga periode, yaitu periode klasik (650-1250 M), periode pertengahan (1250-1800 M), dan periode modern (1800 M s.d sekarang). Dalam realitas sejarahnya, periode klasik menggambarkan masa kejayaan, keemasan atau kemajuan dunia Islam; periode pertengahan menggambarkan masa kemunduran dunia Islam; dan periode modern menggambarkan masa kebangkitan dunia Islam.<sup>32</sup>

Lima dari 14 IAIN yang ada berubah status menjadi UIN, yakni IAIN Jakarta berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2002 berdasarkan SK Presiden RI No. 031 Tahun 2002, IAIN Yokyakarta berubah status menjadi UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta berdasarkan SK Presiden No. 50 Tahun 2004, IAIN Pekanbaru berubah status menjadi UIN Sultan Syarif Qasim berdasarkan SK Presiden No. 2 Tahun 2005, IAIN Bandung berubah status menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung berdasarkan SK Presiden No. 57 Tahun 2005 dan IAIN Ujung Padang berubah status menjadi UIN Alauddin Ujung Padang berdasarkan SK Presiden No. 57 Tahun 2005. Begitu juga dengan STAIN Malang berubah status menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Menurut Malik Fadjar, bahwa usaha dan gagasan perubahan IAIN/STAIN menjadi UIN merupakan usaha mempertegas, mempertajam dan memperbarui pendidikan Islam dalam hal bagaimana melayani kebutuhan mendasar manusia. Sebab, demikian Malik, membicarakan pendidikan sama halnya dengan menimbang masa depan yang sustainable mengalami perubahan. Gagasan perubahan IAIN menjadi STAIN dan UIN diangankan Malik bukan sekedar perubahan “papan nama” tapi sebagai model “reintegrasi keilmuan” yang menunjuk kepada satu bentuk pengembangan, peningkatan dan pemantapan status akademik yang lebih profesional. UIN, misalnya, diprediksikan dapat menjadi model sistem pendidikan Islam yang memiliki “kualitas tinggi” dibandingkan dengan PTN/PTS yang lain yang memiliki status, peran, dan fungsi yang sama, di samping memiliki otonomi lebih luas baik dalam pengembangan akademik, manajemen, maupun administrasinya.<sup>33</sup>

UIN dicita-citakan sebagai *center of excellence* bagi pengembangan kelimuan pada umumnya dan kelimuan Islam pada khususnya, sehingga terbentuk komunitas ilmiah-religius (*religious-scientific community*) yang bersendikan ajaran agama. Bukan sekedar pengawal, penjaga dan pelestari tradisi yang ada.<sup>34</sup>

Gagasan strategi pengembangan pendidikan agama dan keagamaan merupakan kebutuhan yang terus-menerus harus diusahakan. Malik mengungkapkan bahwa mendekati ajaran-ajaran agama dan keagamaan dewasa ini memerlukan perangkat ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan arkeologi. Tentu suatu arah pengembangan mensyaratkan profesionalisme dalam konteks pengelolaan fisik-material, sosial dan etik.<sup>35</sup>

Pengembangan kurikulum dan beberapa program studi di IAIN/STAIN untuk menuju ke UIN pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan secara historic, atau setidaknya tidaknya mendapatkan legitimasi historic. Namun demikian, upaya pemetaan tersebut tidak berpretensi untuk mengadopsi khazanah ulama terdahulu secara *taken for granted*, tetapi hanya sekedar mempertanggungjawabkan apa yang sedang dan akan dikembangkan di IAIN/STAIN menuju ke UIN dalam konteks historic Islam.<sup>36</sup>

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa rencana untuk melakukan perubahan IAIN menjadi UIN, khususnya IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebenarnya sudah lama dibicarakan. Pada akhir masa Prof. Dr. Harun Nasution sebagai Rektor IAIN Jakarta di tahun 80-an sudah melontarkan gagasan tentang perlunya IAIN dikembangkan menjadi dengan beberapa fakultas. Gagasan tersebut selanjutnya dimatangkan dan dituangkan dalam konsep yang semakin konkrit pada akhir masa Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab sebagai Rektor IAIN Jakarta, di tahun 1985-an. Konsep UIN tersebut selanjutnya lebih dimatangkan lagi dan dilengkapi untuk selanjutnya diperjuangkan untuk diwujudkan pada masa Prof. Dr. Azyumardi Azra sebagai rektor. Berbagai upaya kearah itu sudah dilakukan, dengan menerapkan konsep IAIN *with Wider Mandate*<sup>37</sup> (IAIN dengan mandate yang lebih luas).<sup>38</sup>

## **5. Kiprah Alumni IAIN/PTAI**

Secara social para mahasiswa IAIN berasal dari kelompok *marjinal* yang tidak mempunyai kekuatan politik atau kekuatan ekonomi. Namun, pada sisi lain ini, justru menjadi indikasi, bahwa IAIN betul-betul perguruan tinggi rakyat. Dengan kata lain, IAIN bukanlah milik *some selected few* dalam masyarakat dengan segala perangkat hak-hak istimewa (*privilege*)nya.

Dengan latar belakang social yang marjinal itu, IAIN (PTAIN) sejak kelahirannya, tanggal 1 Juni 1957 merangkak pelan-pelan dengan tujuan untuk mengangkat harkat kaum marjinal ini baik secara social, ekonomi, intelektual dan agama tentunya. Sampai berumur dua dasawarsa, IAIN tetap menjadi perguruan tinggi yang marjinal. Bukan hanya marjinal dalam pengertian di atas, tetapi juga dalam lapangan kerja para alumninya. Lapangan kerja bagi pra lulusannya, masih terbatas terutama pada “ketiak” Departemen Agama, atau menjadi guru agama, ustadz, muballigh, bahkan juga pedagang di desa maupun di perkotaan. Ijazah IAIN sampai menjelang tahun 1975-an baru hanya berlaku di Departemen Agama, sementara departemen-departemen atau lembaga-lembaga lainnya cenderung menolaknya. Perkembangan baru terjadi dalam dasawarsa terakhir ini, atau tepatnya setelah tahun 1975-an. Meskipun mahasiswa IAIN tetap berasal dari kelompok marjinal, namun lapangan kerja yang bisa dimasuki para alumni tak lagi marjinal. Ketiadaan atau kurangnya pengangkatan para alumni IAIN oleh Departemen Agama untuk menjadi pegawai negeri, mengakibatkan para “BA” dan “DRS” IAIN mengerahkan segala tenaganya untuk menebus garis demarkasi marginalisasi kerja selama ini. Kekurangan tenaga guru yang dihadapi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membuat “peluang” yang cukup besar bagi alumni IAIN untuk masuk ke departemen itu –terutama sebagai guru di SMP dan SMA– melalui program PGSLP/PGSLA. Dalam program ini, pada umumnya alumni IAIN menunjukkan prestasi yang tak kalah mutunya dengan alumni perguruan lain semacam IKIP.<sup>39</sup>

Depdikbud bukanlah satu-satunya lapangan yang berhasil ditembus para alumni IAIN. Departemen-departemen lain mulai pula “tak sungkan” menerima lulusan IAIN. Karena itu, kini alumni IAIN dapat pula ditemukan di Departemen Luar Negeri, Departemen Penerangan, Departemen Kehakikan, Kejaksaan Agung dan lain-lain. Dalam pada itu, mobilitas “anak-anak” IAIN terlihat pula pada lembaga-lembaga penelitian ilmiah dan pengembangan masyarakat baik pemerintah, dan (apalagi) swasta. Mulai dari LIPI, LRKN dapat ditemukan alumni IAIN. Bahkan pada Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat semacam LP3ES, LSP, PPA, P3M dan sebagainya, jumlah *jebolan* IAIN cukup *significant* dan berkualitas.<sup>40</sup> Bahkan akhir-akhir ini alumni IAIN sudah ada yang menjadi menteri, bupati/walikota, anggota MPR/DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan lain sebagai. Tentunya ini suatu hal yang menggembirakan bagi perkembangan PTAI ke depan, serta menjadi tantangan sekaligus dalam mempersiapkan lulusan yang mampu bergerak di berbagai bidang yang lebih luas.



## 6. Kendala dan Tantangan Pengembangan UIN/IAIN/STAIN dan PTAI

Pengembangan PTAIN menghadapi kendala politis, cultural, sosial, dan psikologis. Kendala politis itu terjadi misalnya menyangkut pengembangan kelembagaan seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru. Pada masa rezim Soeharto sangat sulit mengubah IAIN menjadi UIN karena tidak didukung oleh *good will*, *political will*, maupun *political power* dari pemerintah. Perubahan IAIN menjadi UIN baru bisa terjadi pada 2002. Masih dalam lingkup kendala politis, PTAIN mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif berkaitan dengan pendanaan, terutama pada masa Orde Baru. Alokasi dana yang diberikan pada IAIN seluruh Indonesia yang berjumlah 14 IAIN sama dengan satu perguruan tinggi umum negeri. Ketidakadilan ini juga dirasakan oleh dosen-dosen yang kuliah di jenjang pascasarjana. Dana bantuan yang diperoleh para dosen tersebut berjumlah jauh di bawah kawan-kawan dari dosen perguruan tinggi umum.<sup>41</sup>

PTAIN menghadapi kendala politis secara internal (dari dalam) yang dapat mengganggu perkembangan tradisi akademik yang baik dan mutu pendidikan. Komunitas yang menghuni PTAIN banyak yang berasal dari organisasi pergerakan, padahal pergerakan terkenal memiliki sentuhan politik yang sangat mendalam.<sup>42</sup>

Kendala lain yang dihadapi PTAIN adalah kendala cultural. Ada beberapa jenis budaya yang berkembang di PTAIN tetapi tidak kondusif untuk kemajuan lembaga tersebut. Misalnya, motivasi dakwah mendominasi langkah-langkah civitas akademika sehingga berimplikasi pada munculnya kegiatan tanpa perencanaan yang matang, kecenderungan pada penampilan lebih besar daripada karya, upaya konservasi lebih kuat daripada kreasi, kecenderungan menjadi masyarakat yang suka mendengar dan bercakap-cakap (*listening-speaking society*), lebih suka melakukan pendekatan doctrinal daripada pendekatan rasional, kritis dan lain-lain.<sup>43</sup>

PTAI juga mengalami kendala secara social atau masyarakat, yakni belum memiliki daya tarik bagi masyarakat secara luas. Masyarakat yang memilih PTAIN sebagai tempat kuliah masih terbatas pada kalangan masyarakat santri. Hal ini menunjukkan adanya keterputusan informasi dari PTAIN ke masyarakat. Keterputusan ini semakin jelas dengan masih adanya beberapa orang yang bertanya, misalnya, apakah IAIN itu lembaga pendidikan negeri swasta ?<sup>44</sup>

PTAIN mendapatkan kendala secara psikologis. Masyarakat Indonesia secara psikologis belum bisa diajak maju, baik masyarakat yang berasal dari level pejabat, kalangan pendidikan, siswa/mahasiswa, maupun orang tua. Civitas akademika PTAIN

merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dan tentu juga mewarisi karakter masyarakat Indonesia.<sup>45</sup>

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) mendapatkan beberapa tantangan, yakni tantangan globalisasi, tantangan perkembangan IPTEK, dan tantangan moral.<sup>46</sup> Menurut Azyumardi Azra, bahwa IAIN memiliki beberapa kelemahan, yakni kelemahan kemampuan bahasa, kelemahan sistem dan metode, kelemahan sikap mental ilmiah serta kekurangan piranti keras.<sup>47</sup>

Menurut Muhaimin, bahwa dalam mewujudkan idealisme IAIN/STAIN menjadi UIN masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam realitasnya, etos pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam masih lemah, dan bahkan mengalami kemacetan atau stagnasi. Mengapa demikian ? Ada beberapa kemungkinan jawaban terhadap persoalan ini: *pertama*; mungkin karena terjadi kultus terhadap pemikiran dan hasil temuan ulama atau cedikiawan terdahulu, sehingga karya-karya sesudahnya lebih bersifat *repetition* (pengulangan) atau *recollection* (pengumpulan ulang), dan /atau *syarh* saja, *kedua*; mungkin karena lemahnya etos keilmuan atau semangat dosen dalam mengkaji, meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan ironisnya penelitian/pengkajian hanya sebatas memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, *ketiga*; mungkin karena para dosen lebih cenderung untuk menjadi da'i dalam arti sempit, *keempat*; mungkin karena banyaknya beban jam mengajar mengingat terbatasnya jumlah dosen, atau mobilitasnya tinggi sehingga seorang dosen mampu mengajar di berbagai perguruan tinggi, dan *kelima*; mungkin karena rendahnya penghargaan terhadap karya ilmiah atau hasil-hasil penelitian.<sup>48</sup>

Di samping kendala yang dihadapi dari aspek eksternal IAIN di atas, IAIN juga mengalami kendala dan tantangan dari aspek internal baik dari segi manajemen, kurikulum, proses perkuliahan, mutu dosen, serta kualitas lulusan. Sampai ini, masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh PTAI dalam pengembangan kelembagaannya, sehingga masih mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengeskspansi kelembagaan PTAI kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, terobosan-terobosan baru sangat diharapkan untuk memperbaiki mutu dan kualitas dari lulusan PTAI, sehingga lulusan PTAI dapat berkkiprah lebih luas dalam berbagai bidang keahlian.

## **7. Hubungan Perkembangan IAIN dan Perguruan Tinggi Islam (PTI) dengan Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam**

Dasar-dasar pemikiran pendirian IAIN terkait langsung dengan keterbelakangan umat Islam. Mirip dengan alasan pendirian Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, kehadiran IAIN adalah sebuah usaha mengejar ketertinggalan kalangan Islam dari keterbelakangan pengetahuan “akademis”. Semangat inilah, antara lain, yang tergambar dari ucapan Menteri Agama KH.A. Wahid Hasyim pada 1951 ketika menerima penyerahan Perguruan Agama Islam Negeri (PTAIN) dari panitia pembangunannya. Bahwa sementara kalangan Islam merupakan mayoritas penduduk di Indonesia, tidaklah disangkal bahwa kalangan yang sama belum mempunyai perguruan tinggi agama. “Bagi golongan Islam”, ujarnya, sekolah agama yang mengajarkan dan memelihara pendidikan agama dengan dasar dan pengetahuan betul-betul bernilai universiteit belum ada di Indonesia. Sedangkan bagi golongan agama lainnya, sudah ada sekolah-sekolah theologie yang dapat dibanggakan membuahkan cerdik pandai bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Dilihat dari konteks ini, walau tentu tersembunyi, proses pendirian IAIN –seperti, sekali lagi, UII Yogyakarta- lebih merupakan reaksi psikologis keterbelakangan kalangan Islam dalam dunia intelektual modern dibandingkan dengan kalangan lain –sebagai produk sejarah masa lampau. Maka sedikit berbeda dengan pendiriang Universitas Gajah Mada di Yogyakarta pada 3 maret 1946 yang relative mengaitkan persoalan bangsa sebagai alasan kehadirannya, dapat dikatakan bahwa kemunculan IAIN lebih merupakan respons umat islam Indonesia terhadap kondisi internalnya: “keterbelakangan” dalam berbagai segi, baik dari dimensi intelektual maupun teknikal penyelenggaraan kehidupan modern. Lebih khusus lagi “keterbelakangan” dalam sistem pengajaran maupun sumberdaya manusia bagi kalangan Islam sendiri.<sup>49</sup>

Menurut Masykuri Abdillah, pendirian IAIN pada awalnya hanya merupakan kelanjutan dari “modernisasi” pendidikan Islam tradisional.<sup>50</sup> PTAI dan madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang terbuka dan dengan mudah menerima pembaruan. Pembaruan pendidikan Islam bisa terjadi, baik secara struktural maupun secara cultural. IAIN merupakan bagian dari sistem pendidikan Islam di Indonesia, sehingga IAIN memiliki peran yang besar dalam pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia.

Pengangkatan Prof. H. A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama RI ternyata mempunyai dampak yang luas terhadap perkembangan IAIN. Pertama, para pejabat

Departemen Agama pusat di Jakarta mengalami perubahan besar, dari kepemimpinan para kyai kepada para sarjana lulusan IAIN. Keadaan ini kemudian menggejala pada kepemimpinan Departemen Agama di daerah-daerah. Dalam lingkungan IAIN, gejala serupa juga terjadi, yaitu pergeseran kepemimpinan dari kaum tradisional kepada kaum modernis meskipun tidak selamanya berjalan mulus. H. A. Malik Fadjar, misalnya, Menteri Agama RI pada kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), mengakui bahwa ketika pada Desember 1972 ia diangkat oleh Menteri Agama H. A. Mukti Ali sebagai sekretaris (Kabag. TU) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, ternyata tidak diterima dengan mulus oleh pimpinan fakultas pro-NU yang ada ketika itu, karena dianggap akan mengubah kemapanan. Jabatan itu akhirnya memang diduduki oleh Malik Fadjar, meskipun harus tanpa melalui serah terima jabatan.<sup>5152</sup>

Ada beberapa perbedaan perhatian dari kaum tradisional dan modernis dalam mengembangkan IAIN. Kaum tradisional cenderung menekankan penambahan jumlah IAIN, fakultas-fakultas, termasuk fakultas cabang maupun kelas jauh, bahkan kelas-kelas jauh yang berada di kota-kota propinsi lain maupun kota kabupaten. Kecenderungan kedua dari kaum tradisional adalah upaya mempertahankan studi Islam dalam bentuknya yang mirip dengan kurikulum pesantren atau universitas Al-Azhar, dalam arti banyak menekuni kitab-kitab berbahasa Arab dan kurang menerima ilmu pengetahuan umum sebagai ilmu bantu.

Dengan terbentuknya 36 buah STAIN maka pengembangan IAIN mengalami babak baru lagi. Dengan pendirian STAIN-STAIN ini, studi Islam di daerah-daerah diharapkan perkembangannya menjadi lebih mandiri. Dampaknya mulai terasa, sejumlah STAIN yang lebih kuat dapat berkembang lebih cepat. Akan tetapi STAIN yang lebih lemah akan semakin lemah, karena transfer dan subsidi tenaga dari manajemen dari bekas IAIN induknya menjadi sulit terjadi. Dampak lain dari pendirian STAIN ialah bahwa kurikulum IAIN sejak 1997 ternyata telah diatur dan diperlakukan seperti STAIN, khususnya dalam mengelompokkan MKDK dan MKK sehingga para dosen IAIN merasa seolah-olah kehilangan keberadaan fakultas mereka dan perbedaan kurikulum IAIN antar fakultas menjadi semakin tak jelas. Sebabnya ialah bias dan dipakainya asumsi STAIN yang tentu saja tidak mempunyai fakultas-fakultas, bahkan nama-nama fakultas itu disebut sebagai nama jurusan pada STAIN.

Ada perbedaan lain dari segi kecenderungan antara kaum tradisional dan modernis dalam kaitan studi keislaman dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian kaum modernis, khususnya IAIN Jakarta dan Yogyakarta, berpikir bahwa IAIN mereka

perlu diubah menjadi universitas agar di dalamnya diajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara luas, disamping ilmu-ilmu murni keislaman. Pikiran ini telah berkembang selama sekitar empat tahun terakhir, tetapi karena pukulan krisis ekonomi maka untuk sementara kedua IAIN itu mengambil jalan memperluas mandat dengan membuka program-program studi baru seperti psikologi, perpustakaan dan matematika, tanpa harus mengubah kelembagaannya menjadi universitas. Sementara itu IAIN-IAIN lain juga mengambil langkah serupa, membuka program-program studi baru yang selama ini dianggap di luar studi keislaman murni seperti matematika, perpustakaan, psikologi, jurnalistik, dan lain-lain. Perkembangan mengenai perubahan IAIN menjadi universitas nampaknya untuk sementara akan tersendat, karena di dalam tubuh IAIN sendiri berkembang pendapat terutama dari kalangan tradisionalis yang tidak menghendaki perubahan ini karena dianggap akan mendorong studi agama kepada sudut tertentu dan semakin kehilangan atau mengecil perannya. Di kalangan mereka yang setuju akan rencana perubahan IAIN menjadi universitas, juga ada dua pendapat. Pendapat pertama menghendaki perubahan kelembagaan itu dilakukan secara drastis, baru kemudian disusul dengan pembukaan jurusan-jurusan atau program studi baru. Sedangkan pendapat kedua yang nampaknya lebih konservatif mengatakan bahwa perubahan lembaga itu dapat dilakukan belakangan, sedangkan yang pertama-tama harus dilakukan adalah mendidik dan mempersiapkan tenaga pengajarnya untuk program-program studi baru non-agama yang akan dibuka, baru kemudian dengan program-program studi baru itu sebagai embrio dibentuklah fakultas baru dan selanjutnya barulah IAIN diubah menjadi universitas.

Selama hampir lebih dari tiga puluh tahun, IAIN telah memainkan peranan yang signifikan di dalam pengembangan dan pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia, khususnya pada pendidikan madrasah dan pesantren. Peranan penting ini dapat dilihat bukan hanya terbatas dalam konteks menyediakan guru-guru bagi kalangan pelajar Muslim tetapi –ini yang lebih penting- IAIN telah mempengaruhi cara pandang, pemahaman dan penafsiran Islam yang lebih luas dan terbuka. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertinggi di Indonesia, IAIN telah menjadi salah satu harapan terbaik bagi komunitas Muslim yang ingin mengkaji Islam setelah mereka menamatkan bangku Madrasah Aliyah (MA) atau pesantren. Tentu saja, sejak kelahirannya IAIN tidak langsung menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berciri akademis, dengan wawasan social politik yang luas. Sebelumnya, ruang gerak dan partisipasi intelektual IAIN masih terbatas dan bahkan cenderung terpinggirkan, apalagi jika dibandingkan dengan peranan dan pengaruh kalangan terpelajar dari berbagai perguruan tinggi negeri lainnya.<sup>53</sup>

IAIN dipandang berperan dalam dinamika perkembangan wacana intelektual Islam di Indonesia karena pendekatannya terhadap Islam yang khas. IAIN selama ini lebih menekankan pemaknaan dan pemahaman yang luas terhadap Islam (*broad definition and understanding of Islam*). Corak pemikiran yang seperti ini sangat jelas dirasakan pada, misalnya, IAIN Jakarta (Ciputat). Lembaga pendidikan ini sering disebut sebagai “kampus pembaru”, yang berbasiskan kepada upaya “pembaruan pemikiran Islam”. Watak liberal komunitas intelektual Ciputat ini sudah sedemikian mengakar, sehingga tidaklah mengherankan jika hal ini memunculkan pemahaman keagamaan dan social yang disebut orang dengan istilah “mazhab Ciputat”.<sup>54</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa berdirinya IAIN merupakan kelanjutan pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia atau merupakan respon terhadap 55 pembaruan yang terjadi pada lembaga pendidikan Islam sebelumnya. IAIN/PTI memberikan peran yang besar dalam pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia, termasuk pembaruan yang terjadi pada lembaga pendidikan tinggi Islam sendiri.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Perguruan Tinggi Islam di Indonesia sudah dirikan pada tanggal 10 April 1946 di Yokyakarta dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang pada November 1947 STI dikembangkan menjadi universitas dengan nama Universitas Islam Indonesia mengasuh empat fakultas yaitu agama, hukum, pendidikan, dan ekonomi. Yang dibuka secara resmi pada tanggal 10 Maret 1948, bertepatan dengan 27 Rajab 1367 H.
- b. Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia dinegerikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). PTAIN didirikan di Yokyakarta pada bulan September 1951 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950, yang ditanda tangani oleh Presiden RI. Pada bulan Juni 1957 di Jakarta dibuka Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) oleh Departemen Agama berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957.
- c. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) didirikan pada tanggal 9 Mei 1960 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1960 di Yokyakarta yang merupakan pengembangan dari PTAIN, sedangkan ADIA di Jakarta dijadikan IAIN Jakarta pada tahun 1963.
- d. PTAIN sejak berdirinya pada tahun 1957 sampai saat ini sudah berkembang menjadi 52 PTAIN, yang terdiri dari 11 UIN, 25 IAIN dan 19 STAIN. Ditambah lagi dengan



berdirinya ratusan perguruan tinggi agama Islam swasta dan Fakultas Agama Islam (FAI) di universitas swasta.

- e. Kehadiran IAIN merupakan kelanjutan pembaruan pendidikan pada jenjang sebelumnya, disamping itu dalam IAIN sendiri muncul pembaruan-pembaruan terhadap sistem pendidikan Islam, bahkan lulusan-lulusan IAIN membawa pembaruan-pembaruan yang diperoleh di lembaga tersebut ke madrasah dan pesantren yang ada di Indonesia. Perkembangan PTAI ini memberikan dampak yang besar terhadap mobilitas politik, ekonomi, social, budaya dan lain sebagainya, di kalangan umat Islam di Indonesia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya,
- f. Dalam merespon tuntutan dan perkembangan zaman, dalam tubuh IAIN sendiri terjadi perubahan yang mendasar dengan memperbarui lembaga tersebut menjadi UIN dengan mengintegrasikan keilmuan yang ada, sehingga perguruan tinggi Islam dapat disejajarkan dengan perguruan tinggi lain.

### **Saran**

- a. Kepada pengelola PTAI untuk selalu mengembangkan lembaga pendidikan Islam ini sebagai agen-agen pembaruan pendidikan Islam dengan selalu berupaya meningkatkan mutu lulusan sesuai dengan kebutuhan agama, bangsa dan masyarakat.
- b. Kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap lembaga pendidikan tinggi Islam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Indonesia, dengan mensejajarkan PTAI dengan perguruan tinggi umum lain, tanpa adanya diskriminasi dalam berbagai hal terhadap perguruan tinggi Islam.
- c. Kepada umat Islam di Indonesia memberikan dukungan yang lebih luas terhadap lembaga pendidikan tinggi Islam dalam rangka meningkatkan peran yang lebih besar PTAI di Indonesia dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam.

### **Endnotes**

---

1 Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1999 , h. 189

2 Mujammil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta, Erlangga, 2007, h. 100

3 Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 1996, h. 103

- 
- 4M. Atho' Mudzhar, *Kedudukan IAIN sebagai Perguruan Tinggi, dalam Problem dan Prospek IAIN*, dalam Komaruddin Hidayat, dkk (Ed), *Problem dan Prospek IAIN*, Jakarta, Direktorat Pembinaan PT Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, h. 62
- 5 Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Mahmudiah, 1960, h. 103
- 6 Hasbullah, *Op.Cit.*,h. 103
- 7 Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007, h. 136
- 8 *Ibid.*, h, 137
- 9 Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997, h. 197
- 10 *Ibid*
- 11Mahmud Yunus, *Op. Cit.*, h. 354
- 12 Suwito dan Fauzan, (Ed), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, Jakarta, Kencana, 2008,, h. 324
- 13 Abudin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, Rajawali Pers, 2012, h. 354
- 14 Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta, Logos, 1999, h. 170
- 15 Hanum Hasrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999, h. 210
- 16 A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta, LP3NI, 1998., h. 98
- 17 Cik Hasan Bisri, *Agenda Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam*, Jakarta, Logos, 1999, h. 12
- 18 Azyumardi Azra, *Modernisasi...*h, 175
- 19 Hanum Asrohah,*Op. Cit.*, h. 213
- 20 Azyumardi Azra, *Modernisasi..*h. 176
- 21 A. Malik Fadjar, *Holistik Pemikiran Pendidikan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, h. 35
- 22 Haidar Putra Daulay, *Op. Cit.*, h. 141
- 23 Karel A. Steenbrink, *Pesantren. Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Merdeka*, Jakarta, LP3ES, 1986, h. 205
- 24 Abudin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, h. 412

- 
- 25 Suwito dan Fauzan, (Ed), *Op. Cit.*, h. 325
- 26 Mujamil Qomar, *Op. Cit.*, h. 115. Lihat juga Azyumardi Azra, “Sambutan Rektor” Prospektus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ‘Wawasan Toward Research University, Jakarta: UIN Pres, 2010., h. ii
- 27 Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung, Rosda, 2008, h. 62
- 28 Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta, Prenada Media, 2003, h, 64-68
- 29 Abudin Nata, *Tokoh.. Op. Cit.*, h. 401
- 30 Azyumardi Azra, *IAIN di Tengah Paradigma Perguruan Tinggi*, dalam buku: *Problem dan Prospek IAIN*, Komaruddin Hidayat, dkk (Ed), Jakarta, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 2000, h. 13
- 31Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 63-66
- 32 *Ibid*
- 33 Malik, *Holistik..., Op. Cit.*, h. 37
- 34 *Ibid.*, h. 38
- 35 *Ibid.*, h. 39
- 36 Muhaimin, *Op. Cit.*, h 71
- 37 Konsep IAIN *with Wider Mandate* ini dipopulerkan dan dilaksanakan pada masa Prof. Dr. Azyumardi Azra, sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah
- 38Abudin Nata, *Op.Cit.*, h. 74
- 39 Azra, *Esai...Op.Cit.*,h, 135
- 40 *Ibid*
- 41 Mujamil Qomar, *Op. Cit.*, h. 102
- 42 *Ibid*
- 43 *Ibid.*,h, 103
- 44 *Ibid*
- 45 *Ibid.*, h. 104
- 46 Haidar Putra Daulay, *Op. Cit.*, h. 139-141

---

47 Azra, Esai. *Op. Cit.*, h. 126-128

48 Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 72

49 Komaruddin Hidayat, dkk (Ed), *Op. Cit.*, h. 378

50 Masykuri Abdillah, *Menimbang Kurikulum 1997*, dalam Jurnal Perta No. 1 Vol. 1, September 1997, h. 15

52 H.A. Malik Fajar, “*Manajemen Perguruan Tinggi Agama Islam*” dalam *Sarasehan Pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam pada IAIN Sunan Gunung Djati dan PTAIS Jawa Barat* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1995-6), halaman 95

53 Komaruddin Hidayat, dkk (Ed), *Op. Cit.*, h. 337

54 *Ibid.*, h. 339